

ALASAN INGGRIS KELUAR DARI UNI EROPA PADA REFERENDUM 2016

Pungky Amalia Sudaryono

20130510322

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Email : pungky.amalia@gmail.com

Abstract

The Great Britain can not be detached from the history of its membership of the European Union, already recorded 43 more years United Kingdom became an active member in the European Union. In the process of the membership that emerged partly disappointment group in the United Kingdom who feel the longer the European Union increasingly tease the independence of the United Kingdom, with must obedient with all the regulations of the European Union. Therefore, the country's opinion also appeared to get out of membership of the European Union and became an independent country. The decision to expel countries United Kingdom, has invited a lot once the international community and the public on the country's own United Kingdom that supports or rejects the plan. United Kingdom referendum will be held on 23 June, and whatever the outcome of the decision later whether it survives in membership nor decided to exit will bring impact on

all sectors of the economy or politics in the country. And of course, all the decision of the United Kingdom not only affects the member country of the European Union, the European Union and the international community.

Keywords: European Union, Great Britain, Referendum. Membership

Pendahuluan

Krisis minyak yang terjadi di tahun 1973 mengakibatkan perlambatan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah di negara Inggris. Seiring dengan hal tersebut, Inggris kemudian mulai melirik peluang keanggotaan di Uni Eropa. Di awal pembentukan Uni Eropa, Inggris melihat adanya perbedaan cukup jauh antara PNB (Produk Nasional Bruto) perkapita negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa dengan pertumbuhan PNB Inggris yang kemudian melatarbelakangi Inggris bergabung dengan Uni Eropa. Diharapkan dengan bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa dapat memperbaiki atau meningkatkan keadaan perekonomian Inggris pada saat itu. Inggris kemudian resmi bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 1973. Dalam proses aksesi Inggris ke Uni Eropa, Inggris mengalami beberapa kendala dalam proses keanggotaannya di Uni Eropa.

Selama keanggotaannya dengan Organisasi ini, Inggris adalah salah satu kontribusi besar terhadap perkembangan Uni Eropa terutama dalam pendanaan di Uni Eropa. Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa bukan tanpa alasan, Inggris tentu ingi mendapatkan keuntungan yang besar terkait dengan keanggotaannya di Uni Eropa. Contoh keuntungan yang didapatkan Inggris antara lain mendapatkan

perlindungan dari Uni Eropa terkait segala sektor, menghilangkan hambatan perdagangan seperti kemudahan ekspor dan bea cukai ke Uni Eropa. Seiring dengan keuntungan yang didapatkan Inggris sejak menjadi anggota dalam Uni Eropa menciptakan adanya evaluasi keanggotaan Inggris oleh semua elemen masyarakat Eropa, sejak keanggotaannya pada Uni Eropa di tahun 1973, beberapa pihak kurang setuju terkait dengan hal tersebut, sehingga munculah kelompok-kelompok *pro-brexit* yang menginginkan Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Seiring munculnya kelompok tersebut kemudian muncul sebuah gagasan atau opini dari rakyat untuk menggelar sebuah referendum keanggotaan Inggris terhadap Uni Eropa. Referendum merupakan suatu proses pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amendemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara. Opini yang dibentuk oleh masyarakat kemudian mendorong parlemen dan pemerintahan turut memberikan kontribusi dan suaranya dalam referendum yang digelar.

Inggris mengadakan referendum terakhir terkait keanggotaannya dengan Uni Eropa pada tanggal 23 Juni 2016. Referendum ini adalah referendum kedua, setelah referendum pertama yang digelar di tahun 1975. Sejak diputuskannya bergabungnya Inggris ke Uni Eropa yang pada saat itu bernama Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Untuk pertama kalinya, Keputusan Inggris untuk meninggalkan keanggotaan Uni Eropa dinilai sangat serius dan riskan. Mengingat Inggris adalah aset kuat dan sangat substansial bagi Uni Eropa. Tanpa adanya

Inggris, Uni Eropa dimata mitra kerja negara-negara superpower akan melemah begitupun dengan negara-negara berkembang. (Counsel, The Impact On the UK and the EU, 2015)

Kerangka Dasar Teori

Teori Kebijakan Luar Negeri (James T. Shotwell)

Negara demokrasi maupun otoriter memiliki pola Politik Luar Negeri yang berbeda dengan negara lainnya. Nilai-nilai domestik dan institusi mampu membentuk sebuah kebijakan Luar Negeri suatu negara. Misalnya, pada negara Otoriter maka negara tersebut lebih memilih bertindak secara agresif bukan kooperatif, berbanding tebalik dengan negara demokratis yang justru akan bertindak secara kooperatif. Sebuah Negara demokrasi adalah negara dengan sistem politiknya meletakkan kehendak rakyat sebagai prioritas utama dalam membuat kebijaksanaan. Inggris sendiri sebagai sebuah negara yang demokratis, memiliki karakteristik kebijakan luar negeri yang berbeda apabila dibandingkan dengan negara-negara anggota Uni Eropa lain meski masih dalam satu kawasan. Sehingga, dibutuhkan kerangka pemikiran yang berbeda dalam menganalisis proses kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh sebuah parlemen di Inggris. Dalam sebuah negara demokratis, rakyat dapat mempengaruhi dalam setiap proses pengambilan keputusan luar negeri sebuah negara.

James T. Shotwell berasumsi bahwa:

“Although public opinion is often portrayed as naive , but public opinion and its influence of diplomacy was one of the striking aspects of peace making process after World War I.” (Shotwell, 1973)

Dari asumsi Shotwell tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kaum idealis meyakini bahwa sebuah opini publik merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi diplomasi. Pemikiran kunci dari suatu kenyataan tersebut adalah bahwa sebuah Kebijakan Luar Negeri juga mampu dipengaruhi oleh publik opini. Dalam hal ini publik opini diciptakan oleh rakyat.

Implikasi terhadap studi kasus ini adalah opini rakyat mampu memengaruhi politik luar negeri di Inggris. Opini rakyat ditunjukkan melalui jejak pendapat dengan dibuktikan dengan adanya Referendum Pemerintah Inggris. Dalam menghadapi masalah terkait dengan keberlangsungan keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Sehingga, rakyat Inggris merasa perlu mengadakan referendum tersebut. Meskipun, rakyat dan pemerintah memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda menanggapi referendum tersebut.

Keputusan rakyat Inggris bukan tanpa alasan, akan tetapi tentu rakyat Inggris memiliki beberapa alasan yang mendukung kuat sehingga diselenggarakannya Referendum Inggris. Alasan tersebut bukan terkait dengan kepentingan Nasional negara Inggris karena tidak menggunakan pemikiran realis dalam menganalisa studi kasus ini akan tetapi melalui pemikiran idealis terkait

dengan perasaan rakyat Inggris itu sendiri yang sudah sejak lama ingin keluar dari Uni Eropa.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap buku, literatur, makalah, jurnal ilmiah, majalah atau koran, dan laporan tahunan dari yang diterbitkan oleh instansi atau badan pemerintah yang mengkaji masalah internasional dan sumber yang dianggap resmi, kemudian dianalisa, bagaimana tiap variabel yang saling berhubungan

Pembahasan

Setiap negara memiliki pola Politik Luar Negeri yang berbeda dengan negara lain, terlebih lagi negara tersebut adalah negara yang otoriter atau demokratis. Dibutuhkan kerangka pemikiran yang berbeda dalam proses merumuskan sebuah kebijaksanaan suatu negara. Pada negara seperti Inggris yang Demokratis yang lebih cenderung bersikap kooperatif dengan negara maupun organisasi kawasan atau internasional (Ikbenberry, 1997, hal. 12). Salah satu sikap kooperatif Inggris adalah dengan bergabungnya Inggris dengan organisasi Internasional seperti G7,G20, NATO, Uni Eropa dan lain sebagainya.

Inggris merupakan sebuah negara dengan demokrasi liberal. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara

dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan keputusan dan dijalankan oleh pemerintah dalam negara tersebut.

Pada negara Inggris, pemimpin dalam demokrasi liberal membuat keputusan kebijakan luar negeri melalui *House of Commons*. Sebaliknya hal ini dilakukan melalui diskusi intra partai dan pilih Komite dengan sedikit masukan manuver untuk anggota parlemen. Kemampuan dalam memberikan suara atas isu-isu Nasional misalnya perdebatan dalam bidang hak asasi manusia dan etika kepentingan umum dinyatakan lebih positif melalui *Commons*. Kebijakan luar negeri dalam sebuah negara demokratis keputusan dibuat oleh rakyat dan untuk rakyat. Woodrow Wilson (Liberal) berasumsi bahwa opini publik mempengaruhi kebijakan luar negeri, sekalipun pembuat keputusan tersebut mengambil tindakan-tindakan yang berisiko dan dampaknya pemerintah mau tidak mau harus menerima keputusan yang dibuat oleh rakyat. Dalam kebanyakan kasus-kasus opini publik dapat membatasi pembuat keputusan atas berbagai tindakan, dan akibatnya memilih kebijakan luar negeri yang disukai oleh publik itu sendiri.

Melalui pemikiran Shotwell maka disimpulkan bahwa kaum idealis meyakini bahwa sebuah opini publik merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi diplomasi. Pemikiran kunci dari suatu kenyataan tersebut adalah bahwa sebuah Kebijakan Luar Negeri juga mampu dipengaruhi oleh publik opini. Dalam hal ini publik opini diciptakan oleh rakyat. Keinginan rakyat Inggris untuk mendorong negaranya untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa karena publik

opini yang terbentuk dalam tatanan rakyat Inggris yang memandang bahwa selama keanggotaan dengan Uni Eropa tidak memberikan manfaat yang signifikan terkait dalam sektor pendanaan dan Imigran. Rakyat Inggris juga merasa dirugikan akan hal tersebut, sehingga rakyat Inggris tetap berada pada keputusan untuk keluar dari Uni Eropa.

Opini publik terkait dengan sektor pendanaan adalah bahwa kontribusi yang diberikan terhadap budgeting Uni Eropa dinilai terlalu membebani rakyat Inggris. Inggris telah menjadi salah satu negara dengan kontribusi terbesar ketiga di Uni Eropa setelah Jerman. Besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah Inggris terhadap Uni Eropa tidak semata-mata memberikan keuntungan yang setimpal dengan apa yang diberikan Inggris terhadap Uni Eropa. Rakyat Inggris memandang bahwa akan ada baiknya apabila kita memilih untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Karena dengan demikian, akan meminimalisir budget yang dikeluarkan atau bahkan mengalihkan budget yang setiap tahunnya dibayarkan ke Uni Eropa akan dialihkan pada pendanaan sektor lain seperti Industri. Sementara itu, opini publik terkait dengan Imigran, pada saat sekarang ini jumlah imigran yang datang ke Inggris dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tidak adanya hambatan bagi para migran untuk datang ke tanah Eropa. Imigran tersebut datang dari berbagai negara di dunia. Inggris yang merupakan salah satu negara Uni Eropa didukung dengan kondisi perekonomian Inggris yang matang, meningkatkan daya tarik imigran untuk datang ke Inggris baik untuk para pencari suaka, atau kepentingan lain. Rakyat Inggris kemudian merasa khawatir, isu imigran bukanlah masalah yang sepele karena tentu akan

mempengaruhi keberlangsungan kehidupan rakyat Inggris terutama dalam lapangan kerja. Meningkatnya jumlah imigran tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada, kondisi tersebut justru akan menimbulkan kekhawatiran pula bagi pemerintah Inggris. Mengingat pengangguran akan semakin meningkat dan seiring dengan hal tersebut tingkat kriminalitas yang terjadi di Inggris juga akan semakin meningkat. Dengan Inggris keluar dari Uni Eropa adalah satu langkah efektif dalam membendung imigran yang datang ke Inggris.

Sejak awal bergabungnya Inggris dengan organisasi Uni Eropa ini, beberapa dari elemen masyarakat tidak setuju terhadap bergabungnya Inggris ke Uni Eropa. Perdebatan tersebut datang dari pelaku bisnis, partai politik dan lembaga-lembaga lainnya. Hingga pada tahun kedua keanggotaan Inggris di Uni Eropa, Inggris menggelar referendum pertama kali pada tanggal 6 Juni 1975, referendum tersebut diselenggarakan atas inisiasi partai Buruh dengan menghasilkan kemenangan bagi pendukung yang menginginkan Inggris tetap berada di Masyarakat Ekonomi Eropa dengan persentase 67% berbanding 33% dengan jumlah pemilih 64,5%.

Sedangkan pada referendum 2016, Hasil referendum menyatakan bahwa Britania Raya memutuskan keluar dari UE dengan 51,9% suara Keluar dan 48,1%. Adanya referendum 2016 dipelopori oleh Perdana Menteri David Cameron yang sekaligus menjabat sebagai pemimpin partai konservatif pada saat itu dan melalui pertimbangan evaluasi dari rakyat Inggris terkait dengan keanggotaan Uni Eropa. Terdapat ada perbedaan pada hasil keputusan referendum

di tahun 1975 dan 2016, perbedaan tersebut menunjukkan adanya fundamental politik Inggris telah berubah dari tahun ke tahun.

Daftar Pustaka

Counsel, G. (2015). The Impact On the UK and the EU. *BREXIT* .

Ikbenberry, M. W. (1997). New Thinking of International Relations Theory .
Perseus Book Group .

Shotwell, J. T. (1973). *On the Rim of the Abyss*. Macmillan.

Commons, H. o. (2013). Leaving the EU . hal. 41.

Comptroller. (2016). *Financial management of the European Union budget in 2014*. National Audit Office .

Dougherty, J. E. (2014). *Contending Theories of International Relations* .

Drs. Harwanto Dahlan, M. (1993). Politik dan Pemerintahan Eropa . Yogyakarta.

Folker, J. S. (t.thn.). *Making Sense of International Relations Theory* . London .

Forster, A. (2002). Opposition to Europe in the British. Dalam *Euroscepticism in Contemporary British Politics* (hal. 107). London.

Government, H. (2016). Rights and obligations of European Union